
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT SEBERANG ULU II PALEMBANG

Maya Sari¹, Nyimas Artina², Cherrya Dhia Wenny³

^{1,2}STIE MDP; JL. Rajawali, No 14, Palembang, Telp (0711)376400/fax (0711)376360

³Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang

e-mail: *¹Malawimayasari@gmail.com, ²Nyimas@stie-mdp.ac.id, ³Cherrya@stie-mdp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian, prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan instansi pemerintahan ini dinilai telah memiliki sistem informasi akuntansi yang cukup memadai untuk menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: *Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan*

Abstrack

This research aims to analyze the application of the financial accounting information system of local government to improving the quality of local government financial reports in Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. This study uses a qualitative method by using two types of data are primary and secondary data. In doing research, collection data process in this study using collection data techniques of interviews and documentation. Based on analysis that has been done, these government agencies considered to have had a accounting information system reasonably sufficient to support the improvement of the quality of financial statements.

Keywords: *Local Government Finance Accounting Information System, The Quality of Financial Reports*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi yang didukung dengan perkembangan teknologi mumpuni saat ini, semua negara terutama di Indonesia pasti membutuhkan dan dituntut untuk memiliki pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *good government governance* di seluruh dunia. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah pada tanggal 01 Januari 2001 kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidangpun diubah menjadi kebijakan daerah termasuk pula kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Arus reformasi tersebut juga tentunya sangat berpengaruh dalam setiap bidang kehidupan yang menjadi sorotan terutama dalam penyelenggaraan reformasi, salah satunya ialah bidang birokrasi pemerintahan yang sangat menuntut keberagaman pengelolaan yang berkaitan tentang pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang dapat memuaskan terutama dibidang tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah harus terus melakukan berbagai upaya dan tindakan yang menuju arah perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan negara atau daerah, salah satu caranya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem akuntansi serta administrasi negara secara menyeluruh (Lembaga Administrasi Negara, 2000). Salah satu cara yang telah dan atau dapat ditempuh pemerintah ialah dengan menerbitkan perangkat dan atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara dan atau daerah.

Laporan Keuangan yang sejatinya merupakan media bagi suatu entitas (pemerintah) guna untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah dituntut harus mampu menyediakan dan menyajikan laporan keuangan yang mana informasinya mengandung penjelasan tentang keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik sebagai berikut; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain itu juga hal mendasar dan paling penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah ialah Sistem Akuntansi yang dijadikan dasar dalam penyusunan tersebut. Sebagaimana pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pada tahap akhir penyajian dan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban kinerja keuangan yakni pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun menggunakan suatu sistem yang telah terkomputerisasi dengan baik.

Laporan Keuangan yang pelaporannya dibuat selama satu periode bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas (dalam hal ini pemerintah). Begitu pula dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang di setiap tahunnya mendapatkan penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Opini tersebut di kelompokkan menjadi 4 macam opini yakni (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); (3) Opini Tidak Wajar (TW); dan (4) Pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaporkan pemerintah daerah merupakan indikasi bahwa Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh pihak Daerah sudah sangat memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. Namun apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini berarti Laporan Keuangan yang disajikan dan dilaporkan oleh pihak Daerah tersebut masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga opini tersebut apabila terus menerus diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka hal tersebut merupakan indikasi adanya ketidaksesuaian dengan perundang-undangan, maka dapat mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, potensi kekurangan daerah, kelemahan administrasi, ketidakefektifan dan ketidakefektifan.

Hal ini dapat kita lihat dari Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilanentitas Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang yang mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas) pada tahun 2013. Alasan memberikan pendapat tersebut karena masih adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAK), serta adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan tersebut.

Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang yang juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kota Palembang ikut serta dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya, yang mana hasilnya telah mendapatkan opini dari BPK. Laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang diolah dan disajikan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang mana SIMDA Keuangan diterapkan dalam hal prosedur pengeluaran kas dan penyajian laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca, sedangkan dalam hal prosedur pencatatan penerimaan kas Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang masih menerapkan prosedur pencatatan penerimaan kas dengan buku adapun salinan data agar data tetap terjaga bagian penerimaan kas menggunakan aplikasi MS.Excel. Adanya perbedaan metode pengelolaan prosedur pencatatan antara bagian penerimaan dan pengeluaran kas tersebut diindikasikan dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan data akuntansi, seperti perbedaan metode pencatatan dan pengelolaan data akuntansi dan pelaporan seperti; jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah sistem informasi akuntansi yang ada di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Adapun judul dalam penelitian **“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang ?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah : Untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang dan untuk menerapkan system informasi akuntansi sesuai standard akuntansi pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang.

Manfaat penelitian adalah : Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, serta sebagai bahan pertimbangan antara ilmu yang dipelajari dalam teori dengan praktek yang ada di lingkungan organisasi

pemerintahan. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulisan di masa yang akan datang. Bagi Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang, untuk membantu memperbaiki apabila terdapat kelemahan-kelemahan dalam lingkungan kerja pemerintahan terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi merupakan bagian terpenting dari seluruh informasi dan data yang diperlukan manajemen terutama yang berhubungan dengan data keuangan suatu perusahaan maupun instansi pemerintahan. Agar data yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan maka data keuangan tersebut harus disusun dalam bentuk yang sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk itulah diperlukan suatu sistem yang mengatur arus dan mengelola data akuntansi dalam perusahaan yaitu sistem informasi akuntansi.

Menurut Krismiaji (2015, h.4) sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat memproses data dan transaksi guna untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan atau Akuntansi Sektor Publik secara organisasi akuntansi, domain publik antara lain yakni meliputi pemerintah, BUMN / BUMD, universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Tanjung (2009, h.35) Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran dengan cara yang telah ditentukan dalam ukuran moneter (dalam hal ini uang), dan transaksi atau kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan rangkaian sistematis mulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lainnya yang bertujuan untuk dapat mewujudkan fungsi akuntansi sejak dimulai dari analisis transaksi sampai dengan pada tahap pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

2.4 Sistem dan Prosedur Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pencatatan dalam akuntansi didefinisikan sebagai pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Halim (2007:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya dapat menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan lainnya tersebut.

Prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan menurut Afiah (2009:48) dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

2.5 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah pemerintah mampu dan sanggup menyusun serta menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2.6 Pengertian dan Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan serangkaian daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis dan terpadu oleh seorang akuntan pada akhir periode atau catatan yang dapat memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Pengertian Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007,h.7) 1 laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam beragam cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang mana merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

2.7 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3)Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas (LAK); 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);dan 7)Catatan Atas Laporan keuangan (caLK).

2.8 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.9 Penelitian Terdahulu

Rukmi Juwita (2013) dengan judul “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi standar berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Angga Dwi Permadi (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan yang berada pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Nurlaila (2014) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Penelitian dilakukan dengan melakukan survey dan observasi langsung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ni Made Sudiarianti (2013) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SPIP dan SAP memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Samsudin (2012) dengan judul “Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten DOMPU”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner serta melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kabupaten Dompu mengalami masalah pelaporan keuangan daerah yang berat sehingga hasil pemeriksaan BPK menunjukkan opini disclaimer berturut-turut sejak 2006 sampai 2010.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan mendapatkan data mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas serta prosedur pencatatan dan penyajian laporan keuangan.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang dan subjek dari penelitian ini adalah Kecamatan Seberang Ulu II Palembang yang berlokasi di jalan Jend. A. Yani, 14 Ulu, Seberang Ulu II Palembang.

3.3 Pemilihan Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala bagian perencanaan dan keuangan, karena informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang berasal dari bagian tersebut.

3.4 Jenis Data

Analisis jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder . Data primer yang dimaksud adalah data primer yang berupa hasil wawancara penulis dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas serta pelaporan keuangan di Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang. sedangkan data sekunder berupa informasi mengenai perkembangan opini LKPD BPK dari website resmi bpk.go.id .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (*interview*) yang berupa pertanyaan langsung dan teknik dokumentasi yang berupa *photo* dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dimana data yang diperoleh didapat pada dokumen didalam organisasi pemerintahan khususnya pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik kualitatif dengan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Seberang Ulu II Palembang

Kecamatan Seberang Ulu II Palembang yang resmi dibentuk tahun 1969 merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang tergabung dalam SKPD kota Palembang. Kecamatan Seberang Ulu II yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 14 Ulu Palembang ini membawahi 7 kelurahan yakni kelurahan 11 Ulu, kelurahan 12 Ulu, kelurahan 13 Ulu, kelurahan 14 Ulu, kelurahan Tangga Takat, kelurahan 16 Ulu dan kelurahan Sentosa. Dengan luas sekitar 10,69 km² pada tahun 2016 kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang lumayan besar sekitar 102.530 jiwa atau kepadatan 9.591,21 jiwa/km².

Kecamatan Seberang Ulu II dahulunya tergabung dengan Kecamatan Plaju, yang mana pada tahun 1963 dipisah sehingga untuk kawasan Seberang Ulu II sendiri memiliki 2 kecamatan. Kawasan sekitaran Kecamatan Seberang Ulu II ini sendiri merupakan kawasan yang cukup potensial dari segi kewilayahan dan akses kedalam maupun keluar kota, sehingga banyak sekali dibangun gedung perkantoran maupun sekolah dan universitas di kawasan Seberang Ulu ini.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang mencerminkan keseluruhan pembagian tugas dalam organisasi pemerintahan. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai. Adapun struktur organisasi pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang diantaranya adalah camat, sekretaris camat, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, piñata laporan keuangan, bendahara, staf kasubag, kasi pemerintahan, kasi trantib, kasi pmk, kasi kesos, kasi pelayanan umum, dan staf sub bagian kasi.

4.3 Pembahasan

Dari hasil wawancara dan dokumentasi peneliti kepada bagian perencanaan dan keuangan serta penataan laporan keuangan dapat diinformasikan bahwa instansi pemerintahan ini memiliki masalah mengenai proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini disebabkan karena kebijakan instansi pemerintahan yang menerapkan sistem yang berbeda pada proses pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Bagian penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Camat ini dipisah baik personil yang mengelola, ruangan maupun sistem yang digunakan sehingga mengakibatkan perbedaan prosedur pencatatan yang pada akhirnya akan membuat pelaporan berulang yang tidak efektif dari bagian penerimaan ke bagian pengeluaran kas yang mengelola laporan keuangan Kantor Camat Seberang Ulu II. Berikut tabel pembagian tugas yang seharusnya dikerjakan oleh bagian penerimaan dan pengeluaran kas :

Tabel 4.1Daftar Pembagian Tugas Bagian Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Tahun 2016 Kantor CamatSeberang Ulu II Palembang

No	Pekerjaan	Petugas dan Penanggungjawab		Pelaksana Pekerjaan	
		B. Penerimaan	B. Pengeluaran	B. Penerimaan	B. Pengeluara n
1	Membuat dan memposting transaksi ke dalam buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan.	√		-	-
2	Membuat dan memposting transaksi ke dalam buku pembantu per rincian objek penerimaan (BPPROP).	√		-	-

3	Membuat dan memposting transaksi ke dalam buku rekapitulasi penerimaan harian (BRPH)	√		-	-
4	Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) administrative dan fungsional bendahara penerimaan.	√		-	-
5	Membuat dan memposting transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas.	√		-	√
6	Membuat dan memposting transaksi ke dalam penomoran surat perintah membayar (SPM).	√		√	
7	Membuat dan memposting transaksi ke dalam penomoran surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).	√		√	
8	Membuat dan mengeluarkan surat keterangan/rekomendasi perizinan.	√		√	
9	Membuat dan memposting ke transaksi dalam jurnal dengan aplikasi SIMDA Keuangan.		√		√
10	Membuat dan memposting ke transaksi dalam buku besar dengan aplikasi SIMDA Keuangan.		√		√
11	Membuat dan memposting ke transaksi dalam buku pembantu dengan aplikasi SIMDA Keuangan.		√		√
12	Membuat dan mencetak seluruh komponen laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan.		√		√

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat SU II Palembang, 2016

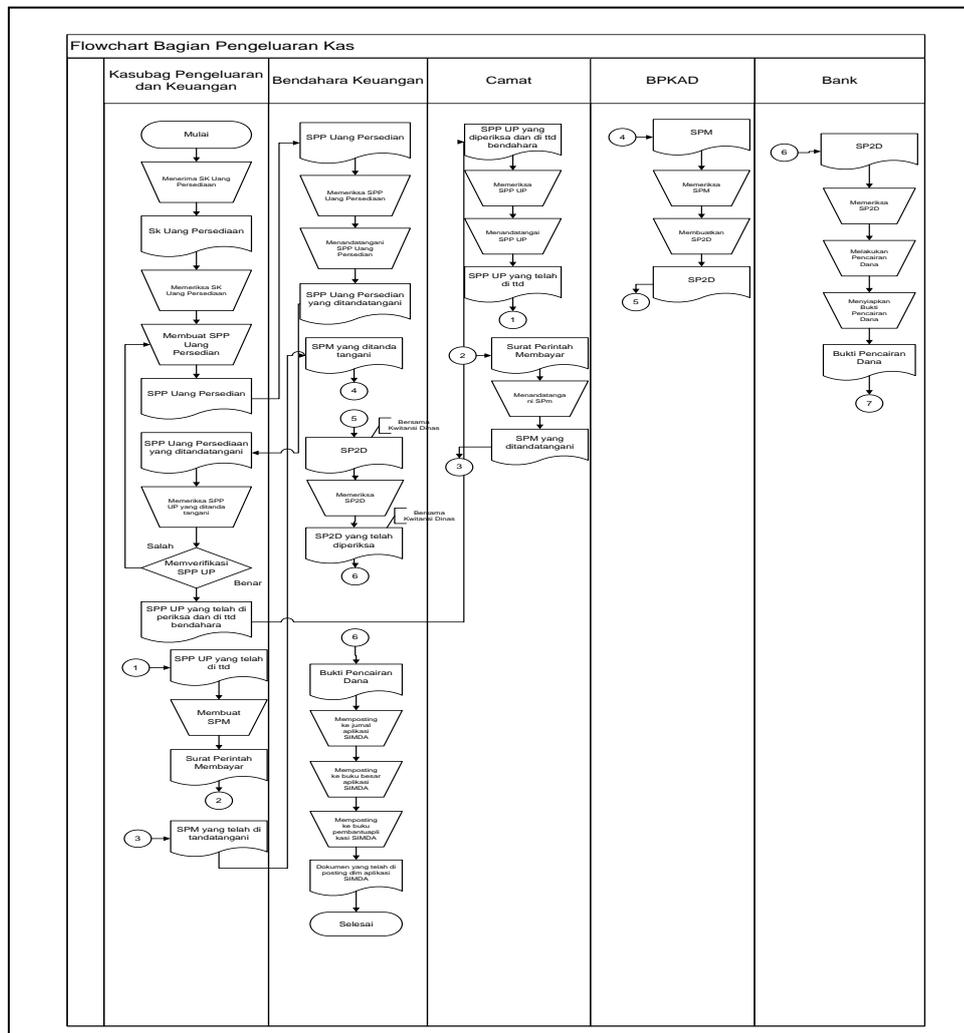
Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa permasalahan atas penerimaan dan pengeluaran kas sering terjadi, karena tidak adanya pertanggungjawaban atas tugas pekerjaan yang harusnya diselesaikan oleh bagian penerimaan sehingga membuat bagian pengeluaran harus mengerjakan tugas dari bagian penerimaan kas. Untuk solusi dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini melakukan analisis sistem informasi akuntansi serta analisis komponen dari laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintahan ini belum sepenuhnya memaksimalkan pengetahuan tenaga kerja (SDM) terutama dalam bidang akuntansi, dan juga aplikasi sistem informasi dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya kelemahan-kelemahan terhadap kelengkapan data siklus akuntansi yang seharusnya dapat dipenuhi bagian perencanaan dan keuangan baik sub-bagian penerimaan kas maupun sub-bagian pengeluaran kas. Sehingga instansi pemerintahan ini dapat dikatakan memiliki prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang kurang tepat yang membuat salah

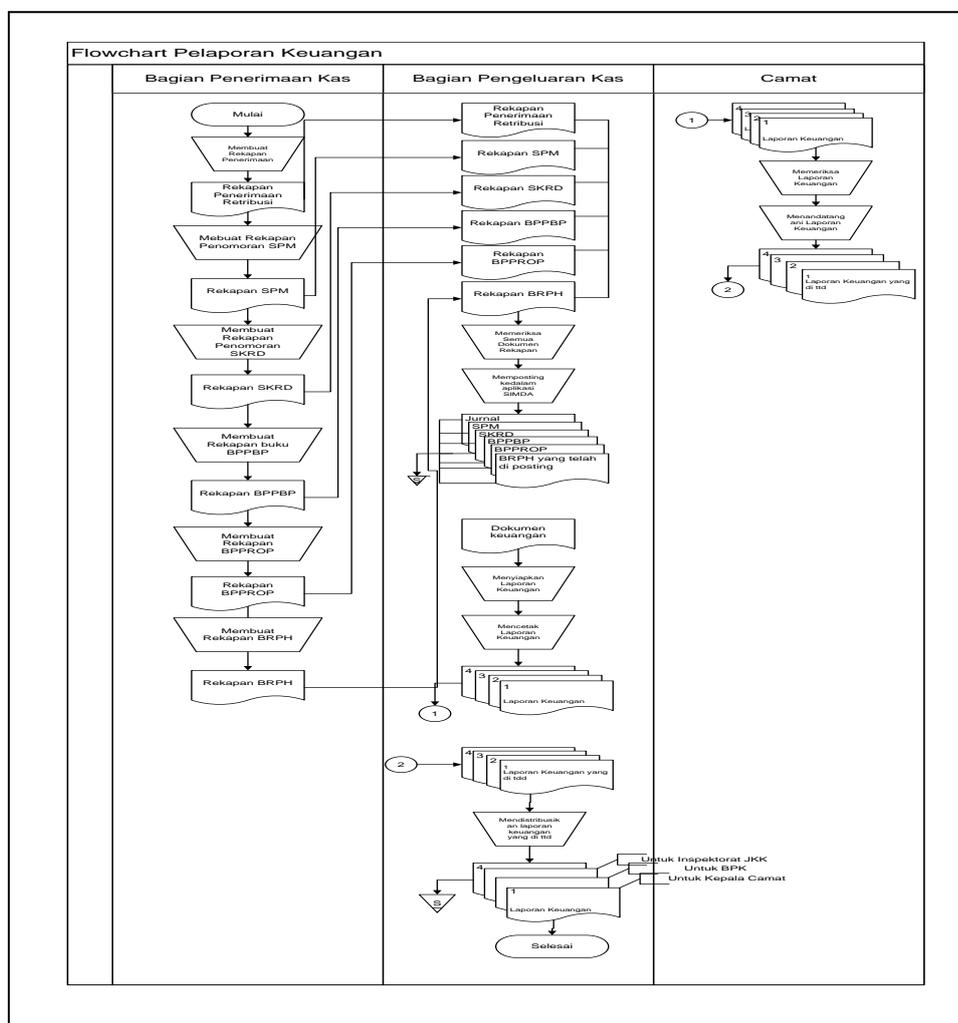
Dari hasil penelitian yang telah di lakukan, instansi pemerintahan ini telah menjalankan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang cukup baik, tetapi masih memiliki kelemahan. Kelemahannya terletak pada bagian penerimaan kas yang tidak memenuhi tanggung jawab tugasnya secara keseluruhan sehingga terjadinya ketidaklengkapan data akuntansi yang mengakibatkan bagian pengeluaranlah yang harus bekerja ulang untuk melengkapi ketidaklengkapan data dari bagian penerimaan kas. Maka dari itu peneliti memberikan usulan atas prosedur yang ada di instansi pemerintahan mengenai prosedur pencatatan penerimaan kas dan menyarankan bagian penerimaan agar dapat melengkapi seluruh data akuntansi yang diperlukan untuk menunjang pada saat pelaporan ke bagian penerimaan kas.

Berdasarkan gambar bagan alir dokumen 4.2 yang diusulkan yaitu dengan adanya tambahan prosedur pencatatan setelah transaksi membuat bagian penerimaan dapat memiliki data akuntansi yang lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan khususnya prosedur dan piñata usahaan pendapatan SKPD.



Gambar 4.3 Flowchart Pengeluaran Kas yang Diusulkan untuk Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang

Berdasarkan gambar bagan alir dokumen 4.3 atas pengeluaran kas pada Kantor Camat Seberang Ulu II peneliti menilai bahwa prosedur sistem informasi akuntansi pada subbagian pengeluaran kas ini telah sesuai dengan standar operasional prosedur keuangan (SOP Keuangan) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.



Gambar 4.4 Flowchart Pelaporan Keuangan yang Diusulkan untuk Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang

Berdasarkan gambar bagan alir dokumen 4.4 hasil pembahasan terlihat bahwa beban kerja bagian pengeluaran berkurang dengan adanya dokumen pendukung yang telah dilengkapi sendiri oleh bagian penerimaan kas, hal ini membuat pekerjaan kedua bagian tersebut lebih efisien dan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

4.4.2 Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan pembahasan mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang baik sebagai berikut :

A. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah di Kantor Camat Seberang Ulu II

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Seberang Ulu II termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari jawaban narasumber mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam 3 indikator yang terdiri dari:

a) Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan karena sistem akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, maka berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Seberang Ulu II sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b) Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum.

Prosedur pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum, maka berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi di Kantor Camat Seberang Ulu II sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

c) Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodek dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodic maka berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan laporan keuangan di Kantor Camat Seberang Ulu II sudah sesuai dan dilakukan secara periodik.

B. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam 1 indikator yaitu :

1) Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

a) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II sudah dikatakan baik karena sudah andal dalam penyajian yang jujur , kesalahan material , sesuai fakta dan dapat diverifikasi.

b) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II sudah dapat dikatakan baik karena disajikan tepat waktu, sudah dapat membantu mengevaluasi kejadian di masa lalu serta membantu memprediksi kejadia di masa yang akan datang.

c) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dan berdasarkan wawancara serta dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II mampu untuk dipahami oleh para pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sudah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan di Kantor Camat Seberang Ulu II maupun oleh pengguna eksternal.

4.4.3 Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang

Berdasarkan analisis yang didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

4.4.4 Analisis Tampilan Rancangan *Form* Dokumen Bagian Penerimaan Kas

Perancangan layar *form* diberikan untuk mengoptimalkan sistem informasi akuntansi yang ada pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang. Rancangan ini berisi tampilan *form* pencatatan penerimaan kas yang berupa *form* jurnal khusus penerimaan, buku penomoran SPM, penomoran SKRD buku penerimaan dan penyeteroran bendahara penerimaan (BPPBP), buku pembantu per rincian objek penerimaan (BPPROP), buku rekapitulasi penerimaan harian (BRPH). Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang ini sebelumnya melakukan pencatatan penerimaan kas dengan menggunakan bantuan aplikasi computer berupa Ms.excel (penyimpanan pendukung) dan pencatatan manual dengan buku (penyimpanan data utama). Pencatatannya dilakukan sesuai dengan tanggal kronologis penerimaan terjadi. Berikut ini adalah rancangan layar (*form*) yang di usulkan untuk Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang dengan menggunakan *Microsoft Access 2007* untuk memudahkan dalam mengakses data:

a. Perancangan Tampilan *Form* Jurnal Penerimaan Kas

Form jurnal penerimaan kas digunakan untuk mengisi data penerimaan kas yang berupa retribusi daerah, dimana terdapat beberapa *field* diantaranya : nomor, tanggal penerimaan kas, nama akun, jumlah (retribusi). Apabila telah selesai *input* data, maka pengguna bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah selesai diinput, menekan tombol tambah apabila ingin menambahkan data, menekan tombol cetak untuk mencetak *input* data yang telah dimasukkan, atau menekan tombol keluar apabila telah selesai memasukkan data dan keluar dari *form* penerimaan kas. *Form* jurnal penerimaan kas dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini:

Pemerintah Kota Palembang
Form Jurnal Penerimaan Kas

Petugas Pelaksana : (dropdown menu)
Tanggal Transaksi : 11/01/2017
Nomor Urut:
Nomor Akun:
Nama Akun:
Jumlah (Retribusi):
Keterangan:

Tambah Simpan
Keluar Cetak

Gambar 4.5 Perancangan Tampilan *Form* Jurnal Penerimaan Kas

b. Perancangan Tampilan *Form* Penomoran SKRD

Form penomoran surat keterangan ketetapan retribusi daerah digunakan untuk mengisi penomoran data transaksi penerimaan kas berupa retribusi daerah, dimana terdapat beberapa *field* diantaranya : nomor, tanggal penerimaan kas, nomor pendaftaran, nama pemohon, jenis perizinan, retribusi, dan keterangan. Apabila telah selesai menginput data, maka pengguna bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah selesai di *input*, menekan tombol tambah apabila ingin menambahkan data, menekan tombol cetak untuk mencetak *input* data yang telah dimasukkan, atau menekan tombol keluar apabila telah selesai memasukkan data dan keluar dari *form* penomoran SKRD. *Form* penomoran SKRD dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini :



The image shows a web-based form titled "Pemerintah Kota Palembang Form Penomoran SKRD". The form is set against a light green background. On the left side, there is a vertical list of labels for input fields: "Nomor:", "Tanggal:", "No. Pendaftaran:", "Nama Pemohon:", "Jenis Perizinan:", "Retribusi:", and "Keterangan:". The "Tanggal:" field contains the value "02-Jan-17". To the right of these labels are corresponding white input boxes. Below the input fields, there are four buttons arranged in a 2x2 grid: "Tambah" (top-left), "Simpan" (top-right), "Keluar" (bottom-left), and "Cetak" (bottom-right). A small logo is visible in the top-left corner of the form area.

Gambar 4.6 Perancangan Tampilan *form* penomoran SKRD

c. Perancangan Tampilan *Form* Penomoran SPM

Form penomoran surat perintah membayar digunakan untuk mengisi penomoran data transaksi penerimaan kas berupa retribusi daerah, dimana terdapat beberapa *field* diantaranya : nomor, tanggal penerimaan kas, nomor pendaftaran, nama pemohon, jenis perizinan, retribusi, dan keterangan. Apabila semua *field* telah terisi tekan tombol *add item* maka data tersebut akan terupdate pada *database*. Apabila telah selesai menginput data, maka pengguna bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah selesai di *input*, menekan tombol tambah apabila ingin menambahkan data, menekan tombol cetak untuk mencetak *input* data yang telah dimasukkan, atau menekan tombol keluar apabila telah selesai memasukkan data dan keluar dari *form* penomoran SPM. *Form* penomoran SPM dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini :

Pemerintah Kota Palembang
Form Penomoran SPM

Nomor:

Tanggal:

No. Pendaftaran:

Nama Pemohon:

Jenis Perizinan:

Retribusi:

Keterangan:

Gambar 4.7 Perancangan *form* Penomoran SPM

d. Perancangan Tampilan *Form* Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan (BPPBP)

Form buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan (BPPBP) digunakan untuk mengisi transaksi data penerimaan kas berupa retribusi daerah, dimana terdapat beberapa *field* diantaranya : nomor, tanggal penerimaan, no.bukti, cara pembayaran, kode rekening, uraian, jumlah, tanggal penyetoran, no.surat tanda setor, jumlah penyetoran dan keterangan. Apabila telah selesai menginput data, maka pengguna bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah selesai di *input*, menekan tombol tambah apabila ingin menambahkan data, menekan tombol cetak untuk mencetak *input* data yang telah dimasukkan, atau menekan tombol keluar apabila telah selesai memasukkan data dan keluar dari *form* buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan (BPPBP). *Form* buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan (BPPBP) dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini :

Pemerintah Kota Palembang
Form Pembukuan BPPBP

SKPD : Kecamatan Seberang Ulu II
Periode: 03 Januari 2017

Penerimaan **Penyetoran**

Nomor: Jumlah Terima:

Tanggal Terima: 1/3/2017 Tanggal Setor:

No Bukti: No STS:

Cara Pembayaran: Jumlah Setor:

Kode Rekening: Keterangan:

Jumlah Terima:

Uraian:

Gambar 4.8 Perancangan *form* BPPBP

e. **Perancangan Tampilan *Form* Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan (BPPROP)**

Form buku pembantu per rincian objek penerimaan (BPPROP) digunakan untuk mengisi data transaksi penerimaan kas berupa retribusi daerah, dimana terdapat beberapa *field* diantaranya : nomor urut, tanggal setor, no.STS & bukti lainnya, dan jumlah. Apabila telah selesai menginput data, maka pengguna bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah selesai di *input*, menekan tombol tambah apabila ingin menambahkan data, menekan tombol cetak untuk mencetak *input* data yang telah dimasukkan, atau menekan tombol keluar apabila telah selesai memasukkan data dan keluar dari *form* buku pembantu per rincian objek penerimaan (BPPROP). *Form* buku pembantu per rincian objek penerimaan (BPPROP) dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut ini :

Pemerintah Kota Palembang
Form Pembukuan BPPROP

SKPD :

Kode Rekening:

Nama Rekening:

Tahun Anggaran :

No Urut	Tanggal Setor	No STS	Bukti Lainnya	Jumlah	Keterangan
1	1/3/2017				

Gambar 4.9 Perancangan *form* BPPROP

f. **Perancangan Tampilan *Form* Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (BRPH)**

Form buku rekapitulasi penerimaan harian (BRPH) digunakan untuk mengisi transaksi data perhari penerimaan kas berupa retribusi daerah, dimana terdapat beberapa *field* diantaranya : no.urut, tanggal, kode dan nama rekening rincian objek, jumlah retribusi, dan keterangan. Apabila telah selesai menginput data, maka pengguna bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah selesai di *input*, menekan tombol tambah apabila ingin menambahkan data, menekan tombol cetak untuk mencetak *input* data yang telah dimasukkan, atau menekan tombol keluar apabila telah selesai memasukkan data dan keluar dari *form* buku rekapitulasi penerimaan harian (BRPH). *Form* buku rekapitulasi penerimaan harian (BRPH) dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini :

Pemerintah Kota Palembang
Form Pembukuan BRPH

SKPD :
Kode Rekening:

No Urut:
Tanggal:
Kode:
Nama Rekening Rincian Obje:
Jumlah Retribus:
Keterangan:

Gambar 4.10 Perancangan *form* BRPH

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terjadi di Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang yaitu terjadinya ketidaklengkapan dokumen akuntansi yang dikelola oleh bagian penerimaan kas. Hal ini menyebabkan pembagian tugas yang telah dibuat untuk masing-masing bagian tidak dilakukan secara benar. Dimana pekerjaan seperti mencatat jurnal yang seharusnya dilakukan oleh bagian penerimaan kas tetapi dikerjakan oleh bagian pengeluaran kas, dan pekerjaan seperti membukukan penerimaan dan penyetoran, pembukuan rekapan per rinci penerimaan, pembukuan rekapan penerimaan harian yang seharusnya dikerjakan tetapi tidak dilaksanakan oleh bagian penerimaan kas. Dengan adanya jurnal khusus penerimaan, buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan (BPPBP), buku pembantu per rincian objek penerimaan (BPPROP), buku rekapitulasi penerimaan harian (BRPH), buku penomoran SPM dan penomoran SKRD dapat melengkapi dokumen akuntansi dari bagian penerimaan kas dan membuat pembagian tugas masing-masing bagian dapat terpenuhi secara benar.
2. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Seberang Ulu II dapat dikatakan masuk ke dalam kategori baik. Hal itu terlihat dari opini LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diberikan oleh BPK terhadap entitas pemerintahan kota Palembang yang dalam hal ini termasuk pula Kantor Camat Seberang Ulu II yang berarti laporan keuangan telah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami sehingga dapat disimpulkan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

5.2. Saran

Adanya saran yang dapat diberikan setelah penelitian dilakukan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan adanya pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu khususnya pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang yang menjadi subjek dalam penelitian ini perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, baik dalam memahami penggunaannya ataupun dalam hal mengetahui standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pentingnya kualifikasi sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik dengan adanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang telah diterapkan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang.
3. Selain itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak terfokus hanya pada satu Kantor Kecamatan saja seperti dalam penelitian ini yang terfokus hanya pada Kantor Camat Seberang Ulu II, namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa Kecamatan bahkan satu (1) SKPD Kecamatan agar dapat menggambarkan secara umum dan luas mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, HT 2009, *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Afifah, NN 2009, *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Angga 2013, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi S1, Universitas Widyatama Bandung, Diakses 15 September 2016, dari www.widyatama.ac.id
- BPK RI 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 1 Tahun 2011*, Diakses 15 September 2016, dari www.bpk.go.id
- BPK RI 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 2 Tahun 2015*, Diakses 15 September 2016, dari www.bpk.go.id
- Halim, A 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, A 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hall, JA 2008, *Sistem Informasi Akuntansi Buku I Edisi IV*, Salemba Empat, Jakarta.

- Ikatan Akuntansi Indonesia 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Juwita, R 2013 2009, *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Penelitian Politeknik Pos Indonesia, Diakses 15 September 2016, dari www.poltekpos.ac.id
- Krismiaji 2015, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat*, UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Narbuko, C dan H. Abu A 2012, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurlaila 2014, *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi S1, Universitas Hasanuddin Makassar, Diakses 15 September 2016, dari www.unhas.ac.id
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 59/PMK.06/2005 mengenai sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rama, DV. & Jones, FL. 2009, *Sistem Informasi Akuntansi* Salemba Empat, Jakarta.
- Romney, M 2014, *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sanusi, A 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarsoe, S.R 2010, *Akuntansi : Suatu Pengantar 4*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfa Beta, Bandung.
- Suhayati, ED 2009, *Akuntansi Keuangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tjahjono, A 2009, *Akuntansi Pengantar 2*, Ganbika, Yogyakarta.
-